

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) dalam Sofyan Syafri Harahap (2012:5) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Sedangkan pengertian Akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Sofyan Syafri (2012:5) adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Adapun pengertian akuntansi keuangan menurut Soemarso (2009 : 15) :
” bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.”

2.1.2 Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Agus Sartono (2015:116) : “Likuiditas perusahaan, menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan.”

Pengertian likuiditas menurut Fred Weston dalam Kasmir (2016:129) : “rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.”

James O.Gill dalam Kasmir (2016:130) : “menyebutkan rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo.”

Rasio likuiditas menurut Kasmir (2012:110) adalah :

“Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di passiva lancar (utang jangka pendek).”

Menurut Kasmir (2016:112) : “terdapat dua macam hasil penilaian terhadap pengukuran rasio ini, yaitu sebagai berikut :

- “1. Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut *likuid*.
2. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut atau tidak mampu, dikatakan *ilikuid*.”

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2012:106) rasio likuiditas dibagi menjadi dua yaitu Rasio Lancar (*Current Asset*) dan Rasio Sangat Lancar (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*). “

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Tujuan dan Manfaat Likuiditas menurut Kasmir (2016:132) :

- “ 1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.”

2.1.2.3 Metode Pengukuran Likuiditas

Menurut Kasmir (2016: 134-142) terdapat jenis-jenis rasio likuiditas sebagai berikut :

1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aset lancar dengan total utang lancar.

Aset lancar adalah harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat.

Utang lancar adalah kewajiban perusahaan jangka pendek minimal satu tahun. Artinya, utang ini segera harus dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun. Rumus untuk rasio lancar :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

2. Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio)

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Untuk mencari *Quick Ratio*, diukur dengan total aset lancar, kemudian dikurangi dengan nilai sediaan. Rumus untuk mencari rasio sangat lancar :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

Atau

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. Rasio Kas (Cash Ratio)

Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketresediaan uang kas dapat

ditunjukkan dari tersedanya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan dari bank. Rumus Rasio Kas adalah :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

Atau

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Current Liabilities}}$$

4. Rasio Perputaran Kas

Menurut James O. Gill, rasio perputaran kas (*cash turn over*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Untuk mencari modal kerja, kurangi aset lancar terhadap utang lancar. Modal kerja dalam penelitian ini dikatakan sebagai modal bersih yang dimiliki perusahaan, sementara itu modal kerja kotor atau modal kerja saja merupakan jumlah dari aset lancar. Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya
- b) Sebaliknya apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam pada aset yang sulit diacirkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang sedikit. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio perputaran kas} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. *Inventory to Net Working Capital*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aset lancar dengan utang lancar. Rumusan untuk mencari *Inventory to Net Working Capital* dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

Indikator yang penulis gunakan dalam metode pengukuran likuiditas pada penelitian ini adalah *Current Ratio*. Adapun penjelasan mengenai rumus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aset

Aset menurut S. Munawir (2002:30) dalam Zusma (2012) adalah sarana atau sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif.

Menurut Zaki Baridwan (2004:20) :

“aset dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Aset Lancar
- b. Aset Tetap
- c. Aset Lain-lain.”

Menurut Alimsyah dan Padji (2006:284) dalam Wahyu (2011) : “Aset lancar adalah harta perusahaan yang dapat ditukar dengan uang tunai dalam waktu relatif singkat, biasanya ukuran waktunya yang dipakai ialah siklus usaha atau tahun buku, yang termasuk aset lancar ialah uang kas, rekening giro bank, investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan barang dagang, biaya dibayar dimuka, wesel, dll.”

Contoh aset lancar menurut Abdulah Shahab (2001:52) dalam Zusma (2012) adalah :

- “ 1. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aset tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.

2. Surat berharga, yaitu investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
3. Wesel tagih, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam suatu undang-undang.
4. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang secara kredit.
5. Persediaan barang, adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum terjual.”

Menurut Jetty J. Weygandt (2007:566) yang dialibahasakan oleh Ali Akbar Yulianto, Wasilah dan Rangga Handika, dalam Hilmi (2011) mengemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut :

“Aset tetap (*plant assets*) adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik : memiliki bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen.”

Contoh aset tetap menurut S. Munawir (2007:17) dalam Nining (2012) adalah :

- “1. Tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir dan lain sebagainya.
2. Bangunan, baik bangunan kantor, toko maupun bangunan untuk pabrik.
3. Mesin
4. Inventaris
5. Kendaraan dan perlengkapan atau alat-lat lainnya.”

Contoh aset tidak berwujud menurut S.Munawir (2007:17) dalam Nining (2012) adalah :

- “ 1. Patent 18 tahun
2. Hak Cipta 28 tahun
3. Merek Dagang 20 tahun

4. *Franchise*
5. *Goodwill*
6. Biaya Penelitian & Pengembangan
7. Biaya Pendirian Perusahaan
8. Leasehold
9. Beban Yang Ditangguhkan

2. *Liabilities*

“*Liabilities* didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa keihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu”. M. Hanafi (2009:29).

Bambang Riyanto (2001:227) dalam Wahyu (2011) menyatakan bahwa:

“*Liabilities* jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun”

“*Liabilities* lancar atau *liabilities* jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang perlunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun seja tanggal neraca) dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan” Munawir.S (2004:18) dalam Nining (2012).

(Bambang Riyanto, 2001:232) dalam Zusma (2012) menyatakan bahwa:

“*Liabilities* jangka menengah adalah hutang yang jangka waktu atau umumnya lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun”.

Menurut Agus Sartono (2014:324) : “*Liabilities* jangka panjang atau *long-term debt* adalah satu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur dimana kreditur bersedia untuk membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Utang jangka panjang ini dapat diperoleh melalui bank,

perusahaan asuransi, atau dapat juga ke *pension fund*. Utang jangka panjang ini mempunyai tiga karakteristik yaitu :cepat, fleksibel dan biaya yang rendah.”

“*Liabilities* jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca)”. Munawir.S (2004:19) dalam Zusma (2012).

2.1.3 Ukuran Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar aset suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang ditanam, semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar akan semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat. (Hilmi dan Ali ,2008).

Menurut Machfoedz (1994) dalam Egy (2009) menyatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, size, nilai pasar saham dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).”

Ukuran perusahaan menunjukkan jumlah pengalaman dan kemampuan tumbuhnya suatu perusahaan yang mengindikasikan kemampuan dan tingkat risiko dalam mengelola investasi yang diberikan para *stockholder* untuk meningkatkan kemakmuran mereka. (Luluk ,2012).

Besar kecilnya (ukuran) perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Ismu (2006).

Perusahaan besar sering berargumen untuk lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena beberapa alasan. Pertama, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih dan memiliki sistem pengendalian intern yang kuat. Kedua, perusahaan besar mendapat pengawasan yang lebih dari investor dan regulator serta lebih menjadi sorotan publik. Secara rinci, perusahaan besar seringkali diikuti oleh sejumlah besar analis yang selalu mengharapkan informasi yang tepat waktu untuk memperkuat maupun meninjau kembali harapan-harapan mereka. Perusahaan besar berada di bawah tekanan untuk mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya (Owusu-Ansah, 2000) dalam Wahyu (2010).

2.1.3.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

”Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

Adanya keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal mengenai besarnya jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan dapat diketahui bahwa semakin besar Total Aset menggambarkan semakin besar ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada Total Aset yang dimiliki oleh perusahaan diatur dengan ketentuan BAPEPAM No.11/PM/1997 Pasal 1 Ayat 1a yang berbunyi:

“Perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (Total Aset) tidak lebih dari Rp 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah).”

Tabel 2.1
Klasifikasi Tingkatan Skala Perusahaan

Skala perusahaan	Tingkat tenaga kerja	Tingkat penjualan
Perusahaan Kecil	5-19 orang	< Rp 3 Milyar
Perusahaan Sedang	20-99 orang	Rp 3 Milyar – Rp 10 Milyar
Perusahaan Besar	100 orang	ke atas > Rp 10 Milyar

Menteri Perindustrian dengan SK No.13/M/SK-1/S/1990 tanggal 14 Maret 1990 mengelompokkan perusahaan dengan didasarkan pada nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Kriteria bidang usaha dengan kelompok industri kecil adalah (a) nilai kekayaan perusahaan seluruhnya tidak lebih dari Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditempati (b) pemilik adalah Warga Negara Indonesia.”

Selain itu pengelompokkan perusahaan yang didasarkan pada nilai aset diatur oleh peraturan Bank Indonesia No.5/18/PBI/2003 tentang pemberian bantuan teknis, Pasal 1 Ayat 4 yang menyatakan bahwa:

“Kriteria bidang usaha dalam kelompok industri kecil (a) nilai kekayaan perusahaan seluruhnya tidak lebih dari Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha (b) pemilik adalah Warga Negara Indonesia.”

Dengan adanya ketentuan ini, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset Rp 200.000.000 keatas dapat dikelompokkan kedalam industri menengah dan besar.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria		
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)		Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta	Usaha Mikro
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M	Usaha Kecil
Usaha Menengah	>10 juta – 10 M	2,5 M – 50 M	Usaha Menengah
Usaha Besar	>10 M	>50 M	Usaha Besar

Sumber: UU No.20 tahun 2008

Kategori Ukuran Perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional terbagi menjadi 3 jenis:

1) Perusahaan besar

Perusahaan besar adalah perusahaan besar yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 milyar/tahun.

- 2) Perusahaan menengah
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 milyar dan kurang dari Rp. 50 milyar.
- 3) Perusahaan kecil
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 milyar/tahun.

2.1.3.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut kusumawardhani (2012:24), ukuran perusahaan merupakan:...salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset dan total penjualan (*netsales*) yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Julia Halim, Carmel Meiden dan Rudolf Lumban Tobing (2005) dalam Jatnika (2013:40) bahwa: ...ukuran perusahaan diukur dari *market capitalization* yaitu jumlah lembar saham beredar akhir tahun dikalikan dengan harga saham penutupan akhir tahun kemudian hasilnya di-*log* agar nilai tidak terlalu besar untuk masuk ke model perusahaan.

Menurut Restuwulan (2013:33) ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan perusahaan adalah:

- “1) Tenaga Kerja
Merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
- 2) Tingkat Penjualan
Merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun.
- 3) Total Utang Ditambah Dengan Nilai Pasar Saham Biasa

Merupakan jumlah utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu atau suatu tanggal tertentu.

4) Total Aset

Merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.”

Indikator yang penulis gunakan dalam metode pengukuran dalam ukuran perusahaan adalah Total Aset.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sartono (2015:7) : “Sangat mudah untuk menjelaskan bahwa tujuan pokok uang ingin dicapai manajer keuangan adalah memaksimalkan profit.

Namun demikian perlu disadari bahwa tujuan ini mengandung banyak kelemahan :

- “1) Standar ekonomi mikro dengan memaksimalkan profit - ingat profit maksimum dapat dicapai pada saat biaya marginal sama dengan pendapatan marginal adalah bersifat statis karena tidak memperhatikan dimensi waktu. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang nyata antara profit dalam jangka pendek dengan profit dalam jangka panjang.
- 2) Pengertian profit itu menyesatkan. Apakah perusahaan harus profit?apabila tingkat keuntungan yang ingin dimaksimalkan, maka timbul masalah penentuan tingkat keuntungan. Apakah keuntungan dalam kaitannya dengan penjualan, dengan total aset, atau dengan kepemilikan modal sendiri?kemudian karena pengertian profit adalah merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya, timbul pertanyaan biaya apa saja yang harus diperhitungkan?haruskah *opportunity costs* harus diperhitungkan dan bagaimana mengukurnya?perlu dipahami pula bahwa pengertian profit tidak sama dengan aliran kas. Laba per saham atau *earning per share* yang semakin besar tidak berarti peningkatan dividen dalam bentuk kas; karena pembayaran dividen hanya ditentukan oleh kebijakan dividen.
- 3) Menyangkut resiko yang berkaitan dengan setiap alternatif keputusan. Memaksimalkan profit tanpa memperhitungkan tingkat resiko setiap alternatif akan sangat menyesatkan.
- 4) Apabila memaksimalkan profit merupakan tujuan utama maka akan sangat mudah dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan.”

Menurut Agus Sartono (2015:122), rasio profitabilitas adalah: “kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri.”

Menurut kasmir (2016:114) : “ Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.”

Sedangkan menurut M.Mamduh Hanafi (2008:42), pengertian rasio profitabilitas adalah: “... untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, modal saham tertentu.”

Menurut Kasmir (2016:196) :“Hasil pengukuran profitabilitas dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak.”

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (M.Mamduh, 2009:83).

Profitabilitas dikatakan baik apabila memenuhi target laba yang telah diharapkan. Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang baik. perusahaan yang mempunyai rugi atau tingkat profitabilitas rendah nantinya akan membawa dampak buruk dari reaksi pasar dan akan menyebabkan turunnya penilaian kinerja suatu perusahaan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang

mengalami berita baik cenderung menyerahkan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Hilmi dan Ali (2008).

Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang baik. Perusahaan yang mempunyai rugi atau tingkat profitabilitas rendah nantinya akan membawa dampak buruk dari reaksi pasar dan akan menyebabkan turunnya penilaian kinerja suatu perusahaan. Srimindari (2008).

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2016:197-198), yaitu:

- “1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
7. Dan tujuan lainnya.”

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

- “1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Manfaat lainnya.

2.1.4.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2015:122), terdapat jenis-jenis rasio profitabilitas sebagai berikut:

“1. *Gross Profit Margin* (margin laba kotor)

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien. Sawir (2009;18)

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* semakin kurang baik operasi perusahaan. Syamsuddin (2009:61)

Gross Profit Margin dihitung dengan formula:

$$Gross Profit Margin = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan *net profit margin* dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. Rentabilitas Ekonomi/daya laba besar/basic earning power

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset. Jadi rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan aset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain rentabilitas ekonomi menunjukkan kemampuan total aset dalam menghasilkan laba.

Rentabilitas ekonomi mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang menunjukkan rentabilitas ekonomi perusahaan. Sawir (2009:19).

Rentabilitas Ekonomi dihitung dengan rumus:

$$\text{Rentabilitas Ekonomi} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Menurut Sawir (2009:19), Rentabilitas ekonomi dapat ditentukan dengan mengalikan *operating profit margin* dengan *asset turnover*.

Rendahnya Rentabilitas Ekonomi tergantung dari:

1. *Asset Turnover*.
2. *Operating Profit Margin*

Operating profit margin merupakan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. *Operating profit margin* merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut *pure profit* yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Syamsuddin (2009:61).

Operating profit disebut murni (*pure*) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Apabila semakin tinggi *operating profit margin* maka akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating profit margin* dihitung sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

4. *Return on Investment*

Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset. *Return on investment* merupakan rasio

yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia di dalam perusahaan. Syamsuddin (2009:63).

Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. *Return on investment* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aset. Syafri (2008:63). *Return on investment* dihitung dengan rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Atau dapat juga dihitung dengan: ***ROI = Net Profit Margin x Assets turn over***

5. ***Return on Equity***

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return on equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Syafri (2008:305).

Return on equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal

sendiri atau pemegang saham perusahaan. Sawir (2009:20). ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha.

Return on equity dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal sendiri}}$$

6. *Earning per share (EPS)*

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba. Syafri (2008:306).

Earning per share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Syamsuddin (2009:66). Oleh karena itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan *earning per share*. *Earning per share* adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan. *Earning per share* dihitung dengan rumus:

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Deviden Saham Preferen}}{\text{Jumlah saham biasa yang beredar}}$$

7. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Hal ini dikarenakan bahwa ROA cukup representatif dalam menggambarkan hubungan antara laba operasi dengan aset operasi Tandelilin (2001) dalam Khiyanda (2009). *Return On Assets* dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Indikator yang penulis gunakan dalam metode pengukuran dalam profitabilitas adalah *Return On Assets*, adapun penjelasan lengkap mengenai rumus tersebut:

1. **Laba**

Menurut Soemarso (2004:245) Laba adalah: ...selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu.

Pengertian laba menurut Zaky Baridwan (2010 : 29) adalah:

“Kenaikan modal (aset bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain

yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang termasuk dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemilik.”

Commite On Terminology (Sofyan Syafri H : 2004) dalam Aliyal Azmi (2007:12) mendefinisikan laba:...sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2001: 219) dalam Restuwulan (2013) mengemukakan jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu:

- a. Laba kotor
- b. Laba dari operasi
- c. Laba bersih

Adapun penjelasan jenis-jenis laba diatas sebagai berikut:

“1. Laba Kotor

Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.

2. Laba dari operasi

Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban biaya.

3. Laba Bersih

Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban lain-lain. Setiap perusahaan ataupun jenis usaha lainnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba yang besar untuk dapat memperoleh keuntungan.”

Karakteristik Laba Chariri dan Ghozali (2003:214) dalam Rosyidah (2013) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- “1. Laba didasarkan ada transaksi yang benar-benar terjadi,
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu,
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan,
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.”

Tujuan Laba menurut Anis dan Imam (2003:216) dalam Samiun (2014) adalah sebagai berikut:

- “a. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertahan dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembaliannya.
- b. Sebagai dasar pengukuran prestasi manajemen.
- c. Sebagai dasar penentuan besarnya perencanaan pajak.
- d. Sebagai alat pengendalian sumber daya ekonomi suatu negara.
- e. Sebagai kompensasi dan pembagian bonus.
- f. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
- g. Sebagai dasar bentuk kenaikan kemakmuran.
- h. Sebagai dasar pembagian deviden.”

2.1.5 Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

2.1.5.1 Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Baridwan (1992) dalam Putra (2011). ketetapan waktu menunjukkan rentang waktu dengan penyajian informasi yang diinginkan serta frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak tepat waktu menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan tersebut, dimana syarat relevan harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Tepat waktu, yaitu jika informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada saat informasi dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dan lengkap, yaitu informasi tersebut

disajikan selengkap mungkin, sehingga mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk mengungkapkan dengan jelas seluruh informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan, agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kendala ketepatan waktu. Permatasari (2005).

Owushu-Ansah (2000) berpendapat, secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan hal ini dikarenakan ketepatan waktu tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat baru dan tidak *out of date* dan informasi yang baru tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan tersebut baik. Kerelevanan suatu laporan keuangan dapat diperoleh apabila laporan keuangan tersebut dapat disajikan tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan yang penting pada publikasi laporan keuangan. Hendriksen dalam Badni dan Hananto (2000) menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. Ketepatan waktu informasi akuntansi mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi,

dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi pegambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

Ketepatan waktu bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka. Kadir (2011:3).

Chamber dan Penman (1984:2) dalam Septiani (2005) mengukur ketepatan waktu dalam dua cara, yaitu:

- “1. Ketepatan waktu sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan;
2. Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.”

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 menyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat wajar dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dan apabila melebihi batas waktu yang ditentukan

perusahaan dinyatakan terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya dan akan dikenakan sanksi dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor 307/BEJ/07-2004.

2.1.5.2 Peraturan Pelaporan Keuangan di Indonesia

Financial Accounting Standards Board Hendriksen dan Van Breda, (2000:136) dalam Wahyu (2010) meringkaskan bahwa tujuan-tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dan pemakai lain yang sekarang dan yang potensial mengambil keputusan rasional untuk investasi, kredit dan yang serupa.
- b. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi guna membantu investor dan kreditor dan pemakai lain yang sekarang dan yang potensial dalam menetapkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, atau jatuh tempo surat berharga atau pinjaman.
- c. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dari satuan usaha, tuntutan terhadap sumber daya tersebut (kewajiban satuan usaha itu untuk mentransfer sumber daya ke satuan usaha lain dan modal pemilik), dan pengaruh transaksi, kejadian, dan situasi yang mengubah sumber daya danuntutannya pada sumber daya tersebut.

Pada Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian ada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dikutip dari (www.bapepam.go.id).

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan, dikutip dari (www.bapepam.go.id).

Untuk laporan keuangan tengah tahunan: (1) selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun buku berakhir jika tidak disertai laporan akuntan; (2) selambat-lambatnya 90 hari setelah tengah tahun buku berakhir jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; (3) selambat-lambatnya 120 hari setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Namun sejak tanggal

30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor: X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2004 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dikuti dari (www.bapepam.go.id).

Peraturan Bapepam Nomor: X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Bekala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan, dikutip dari (www.bapepam.go.id).

2.2 Kerangka Pemikiran

Definisi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan yang diungkapkan oleh Gregory dan Van Horn (1963) dalam Owusu-Ansah (2000), bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Hendriksen (2000) dalam Khiyanda Alfian Nasution (2013), menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan

dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan.

Ketepatan waktu pelaporan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai, karena itu keterlambatan pelaporan dapat berakibat buruk bagi perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Ketepatan waktu pelaporan dapat diukur menggunakan tiga kriteria keterlambatan, yaitu pertama interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir oleh bursa, kedua ditentukan berdasarkan jumlah hari antara laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, dan ketiga dengan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. Ketepatan waktu laporan keuangan merupakan *good news* (berita baik) bagi setiap perusahaan. Selain dapat menguntungkan perusahaan dalam menarik minat investor juga menghindari dari ketetapan sanksi yang diberikan oleh BAPEPAM. Karena semakin panjang suatu keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan maka akan memberikan dampak negatif dari pelaku pasar modal.

2.2.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi hutang lancar dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Munawir (2004:31). Rasio likuiditas akan menentukan atau memberi gambaran apakah sebuah perusahaan likuid atau tidak. Artinya kewajiban-kewajiban finansial jangka pendek jatuh tempo, mampukah perusahaan mengatasi hal tersebut.

Likuiditas mengacu ada ketersediaan sumber daya (kemampuan) perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Untuk menghitung berapa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar dengan menggunakan aset lancar yang tersedia, semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Fakhruddin dan Hadianto (2001).

Likuiditas suatu perusahaan sering ditunjukkan oleh rasio lancar yaitu membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat memberikan sebuah ukuran likuiditas yang cepat, mudah digunakan dan mampu menjadi indikator terbaik dari sampai sejauh mana klaim dari kreditor jangka pendek telah ditutupi oleh aset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan cukup cepat. Brigham & Houston (2006).

Suharli & Rachpiliani (2006) dalam Khiyanda Alfian Nasution (2013), menyatakan bahwa Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini merupakan berita baik (*good news*) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat

didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Dyer dan Mc.Hugh dalam Hilmi dan Ali (2008:202) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, adanya pengawasan investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka akan memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Selain itu ukuran perusahaan juga disebabkan oleh ketersediaan informasi yang dipublikasikan. Jumlah informasi yang dipublikasikan untuk perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Srimindarti (2008). Perusahaan besar mempunyai pengetahuan lebih tentang peraturan yang ada, oleh karena itu perusahaan besar lebih mentaati peraturan mengenai ketepatan waktu dibandingkan perusahaan kecil. Saleh dan Susilowaty (2004).

Terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan tahunan, ukuran perusahaan juga merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan, hal ini disebabkan karena semakin besar perusahaan maka laporan keuangan akan dilaporkan dengan lebih cepat, hal ini juga akibat dari lebih banyaknya sumber informasi yang dimiliki perusahaan berskala besar. Wirakusuma (2004). Owusu-Ansah (2000), Aryati dan Theresia (2005), Rachmawati (2008), dan Hilmi dan Ali (2008) membuktikan bahwa perusahaan besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan demikian tampak bahwa ukuran

perusahaan sebagai suatu fungsi dari ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu dalam Pelaporan Keuangan

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Hal ini juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah, dalam hal ini mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya.

Dyer dan Mc.Hugh dalam Hilmi dan Ali (2008:311) menyatakan bahwa Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Hal ini juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa jika laba berisi berita baik maka pihak manajemen cenderung melaporkan tepat waktu dan sebaliknya. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka diduga perusahaan akan semakin cepat menyerahkan laporan keuangannya.

2.3 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

- H1 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.
- H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan dalam waktu pelaporan keuangan.
- H3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.